

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, cetakan ke II, CV Mandar Maju, Bandung.
- Eko Sugitario, 2019, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Dilengkapi Dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Dalam Kesatuan)*, Firstbox Media, Jakarta.
- Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Indroharto, 2003, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Buku II, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya Bandung.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, A. Hamid S. Attamimi, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 2007, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yoyakarta.
- Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Nurnaningsih Amriani, *Media Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta
- Paulus Effendi Lolotung, 1993, *Beberapa Sistem tentang control segi hukum terhadap pemerintah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

- Philipus M. Hadjon et all, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Pradjudi Atmosudirjo, 1994, *Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*, Liberty, Yogyakarta.
- Ridawan dan Nurmala Ayunintiyas Harahap, 2018, *Hukum Kepegawaian*, UII Pres, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2007, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk ke-12, Rajawali Pres, Jakarta.
- Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sadjijono, 2011, *Bab-Bab Pokok Hukum Administratif*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S.F. Marbun, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- SF. Marbun, et. all, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Sjahran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Soedibyo Triatmodjo, 1983, *Hukum Kepegawaian (Mengenai Kedudukan hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soegeng Prijodarminto, 1993 *Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian dari Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita. Jakarta.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Ctk ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009 *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2011, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942*, Atma Jaya, Yogyakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2009, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Winardi, *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Adrian E. Rompis, et. all.,*Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Banding Administrasi Di Badan Pertimbangan Kepegawaian*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, Vol. 6, No. 1 Juni 2012.

Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Azzahrawi, dkk, 2019, *Wewenang Dan Kendala Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan SengketaKepegawaian Setelah Upaya Administratif*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 3, No.2 Agustus 2019.

Firzhal Arzhi jiwantara, 2019, *Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi*, Jurnal Jatiswara Vol.34 No. 2 Juli 2019, Mataram.

Lalu Ihsan, 2014, *Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Dari Aspek Hukum Kepegawaian Dan Sistem Peradilan Administrasi*. Dalam Jurnal Ius Vol Ii No. 5 Agustus 2014.

Nurmalita Ayuningtyas Harahap, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi aparatur Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Yuridis Vol 3 No. 2 Desember 2016.

Robinsar Marbun, 2017, *Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017.

Wicipto Setiadi, 1987, *Sengketa Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemerintah setelah menempuh Upaya Administratif.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.